

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.2.1. Konsep Kepengurusan oleh Suatu Organ Pada Perseroan Perorangan Bagi Usaha Mikro dan Kecil.....	11
1.2.2. Konsep Tanggung Jawab Terbatas Pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2. Manfaat Praktis.....	13
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum.....	13
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	14
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	16
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	17
1.6. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II	KONSEP KEPENGURUSAN OLEH SUATU ORGAN PADA	
	PERSEROAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN	
	KECIL.....	20
	2.1. Perseroan Terbatas (PT).....	20
	2.1.1. Perseroan Perorangan.....	23
	2.1.2. Organ Pada Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan	
	bagi Usaha Mikro dan Kecil.....	26
	2.2. Usaha Mikro Dan Kecil (UMK).....	30
	2.2.1. Organ Usaha Mikro dan Kecil.....	34
	2.3. Analisis Kepengurusan Suatu Organ Pada Perseroan	
	Perorangan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK).....	36
BAB	KONSEP TANGGUNG JAWAB TERBATAS PADA	
III	PERSEROAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN	
	KECIL.....	44
	3.1. Tanggung Jawab Terbatas (<i>Limited Liability</i>) Perseroan	
	Terbatas.....	44
	3.2. Tanggung Jawab Terbatas oleh Direksi Perseroan Terbatas.....	50
	3.3. Analisis Pertanggungjawaban Terbatas Oleh Perseroan	
	Perorangan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil.....	53
BAB	PENUTUP.....	59
IV	4.1. Kesimpulan.....	59
	4.2. Saran.....	60
	DAFTAR BACAAN.....	62

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).